

Survei SMRC: Hanya 9,2 Persen WNI Setuju Indonesia jadi Negara Khilafah

sumber berita : [9,2 Persen WNI setuju Indonesia jadi Negara Khilafah](#)

JAKARTA, KOMPAS.com - Mayoritas masyarakat masih mendukung bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika. Hanya sedikit masyarakat yang mendukung Indonesia berubah menjadi negara khilafah.

Hal ini diketahui berdasarkan survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang dirilis pada Minggu (4/6/2017).

Sebanyak 79,3 persen responden menyatakan bahwa NKRI adalah yang terbaik bagi Indonesia. Hanya 9,2 persen responden yang setuju NKRI diganti menjadi negara khilafah atau negara Islam.

Sementara 11,5 persen lainnya responden mengaku tidak tahu atau tidak menjawab.

Saiful Mujani mengatakan, sebanyak 9,2 persen warga yang ingin NKRI berubah menjadi negara khilafah memang bukan lah jumlah yang sedikit.

"Jumlahnya bisa sampai 20 juta penduduk, lebih banyak dari warga Singapura," kata Saiful saat menyampaikan hasil surveinya.

Namun, Saiful mengingatkan bahwa jumlah penduduk yang mendukung NKRI berjumlah jauh lebih besar. Jumlahnya bisa mencapai 180 juta penduduk.

"Kita tidak bisa mengabaikan yang 180 juta ini. Mayoritas masyarakat Indonesia masih mendukung NKRI," ucap Saiful.

Sementara itu, saat ditanya apakah NKRI saat ini mengalami pelemahan, 61,8 persen responden menyatakan tidak setuju. Hanya 14,5 persen yang setuju NKRI melemah dan terancam bubar. "Jadi saya kira pemerintah tidak perlu khawatir, masih banyak yang mendukung dan optimis dengan NKRI," ucap dia.

Jakarta, Beritasatu.com - Pengamat politik Donny Gahril Adian mengemukakan bahwa paham khilafah memang bertentangan dengan Pancasila, menyusul imbauan Wantim MUI Din Syamsuddin agar pemerintah tidak menyamaratakan semua paham yang anti pancasila karena dapat menciptakan suasana perpecahan.

"Pancasila itu ideologi bangsa, dalam Pancasila terkandung nilai nasionalisme (sila ketiga) dan demokrasi (sila keempat)," kata Donny, di Jakarta, Sabtu (30/3).

Menurut Donny, khilafah sebagai keyakinan tentang tugas suci manusia di bumi sangat dihormati. Namun, kata dia, khilafah sebagai ideologi politik yang ingin mengganti Pancasila sebagai pemersatu bangsa harus ditolak.

"Khilafah yang dipertentangkan dengan Pancasila bukan keyakinan melainkan ideologi politik. Ideologi politik yang bertentangan dengan sila ketiga (nasionalisme) dan keempat (demokrasi) dalam Pancasila," katanya.

Menurut Donny, mempertentangkan khilafah dan Pancasila sudah tepat dan akurat, sebab Pancasila merupakan ideologi bangsa bukan keyakinan.

Tugas Siswa

Diskusikan dalam kelompok 4-5 orang siswa, dan jawablah pertanyaan di bawah ini dengan baik dan logis.

1. **Jelaskan Kasus Peningkaran Kewajiban Warga Negara terjadi dalam teks berita di atas.**
2. **Pasal yang dilanggar Dalam UUD NRI Tahun 1945.**
3. **Faktor Apa Yang menyebabkan terjadinya Kasus tersebut.**
4. **Upaya apa yang di lakukan untuk dapat mencegah (preventif) atau Menyelesaikan (Represif/Kuratif) Kasus tersebut.**



MATERI
Kasus² Pelanggaran
dan Peningkaran
Kewajiban Warga
Negara